



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN PARTISPASI SOSIAL

Destalenta Trisna Laoli¹⁾, Merlis Telaumbanua²⁾

¹⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: destalenta03@gmail.com

²⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: merlistelaumbanua@gmail.com

Abstract

Citizenship education plays a crucial role in shaping social awareness and participation within communities. This article discusses efforts to empower communities through citizenship education as a strategy to enhance social participation in community life. This empowerment includes providing knowledge, skills, and understanding of the rights and responsibilities of responsible citizens. Through citizenship education, communities are expected to actively participate in decision-making processes, social activities, and maintaining social harmony. Moreover, increased social participation also contributes to sustainable development and the strengthening of democracy at both local and national levels. This research employs a qualitative method with a case study approach in several communities. The findings indicate that community empowerment through citizenship education can enhance social awareness, solidarity, and community engagement in social activities. Thus, citizenship education functions not only as a means of formal learning but also as an effective empowerment tool for creating participatory and resilient communities.

Keywords: *Community Empowerment, Citizenship Education, Social Participation, Social Awareness, Democracy.*

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi sosial dalam masyarakat. Artikel ini membahas upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan ini meliputi pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan sosial, dan menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, peningkatan partisipasi sosial juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan penguatan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran sosial, solidaritas, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran formal, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan tangguh.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Sosial, Kesadaran Sosial, Demokrasi.



PENDAHULUAN

Pendidikan tidak akan terlahir jika tidak ada dukungan dari masyarakat dalam hal ini dengan dukungan baik dan partisipasi dalam masyarakat sehingga pendidikan menjadi lebih baik dan bisa membawahkan suatu dampak yang sangat baik pada generasi generasi yang akan datang. Pendidikan dilakukan bertujuan bagi kemajuan, perubahan, dan stabilitas sosial

dari masyarakat. Pendidikan dilakukan tidak lain untuk kepentingan sebuah masyarakat, baik di tingkat lokal, keluarga, daerah, provinsi, dan bangsa secara keseluruhan dengan adanya suatu pendidikan maka terjaminlah suatu kehidupan yang baik didalam masyarakat dalam hal ini pendidikan sangatlah penting dalam mengembangkan sebuah pengalaman yang lebih tepatnya dalam kehidupan Bermasyarakat dengan adanya dukungan dalam masyarakat maka terjamin lah kehidupan yang tentram dan damai di sebuah tempat dan lingkungan. Pendidikan menengahi masyarakat atau hubungan pendidikan dengan masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib pendidikan adalah masyarakat. Bila ada pendidikan yang maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, bila ada pendidikan yang bernasib memprihatinkan, salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat enggan mendukung.

Berdasarkan hasil observasi awal sebelumnya adapun beberapa masalah yaitu : 1. Masyarakat Tidak saling membantu didalam lingkungan sehingga pemberdayaan dan partisipasi sangatlah minim.

(2.). Tidak adanya penguatan jaringan sosial atau solidaritas antar warga Contoh dalam hal ini masyarakat selalu mementingkan diri sendiri (3).tidak memiliki kesadaran sosial dan toleransi terhadap perbedaan yang ada didalam masyarakat yaitu: agama,ras, budaya.(4) Tidaknya

adanya kegiatan sosial penanggulangan dana terkait partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan

Kepercayaan masyarakat salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pendidikan mereka akan mendukung penuh terhadap jalannya pendidikan itu. Oleh karena itu, masyarakat merupakan komponen strategis yang harus mendapat perhatian penuh oleh pendidikan. Masyarakat memiliki posisi ganda, yaitu sebagai objek dan sebagai subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi penerimaan calon siswa baru, maka masyarakat merupakan objek yang mutlak dibutuhkan. Sementara itu, respons masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Posisi masyarakat sebagai subjek juga terjadi ketika mereka menjadi pengguna lulusan lembaga pendidikan.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah : (1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial (2).apa kendala pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial.(3). Bagaimana upaya pemberdayaan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial.

Oleh karena itu, partisipasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat harus dikelola dengan baik. Partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya. Khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan pendidikan. Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin



hubungan secara insentif dan proaktif di samping membangun citra lembaga pendidikan yang baik

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Meningkatkan Kesadaran Kewarganegaraan: Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka lebih memahami peran mereka dalam masyarakat. (2). Mendorong Partisipasi Aktif: Memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

(3). Mengembangkan Keterampilan Sosial: Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam komunitas. (4). Membangun Jaringan Sosial: Menghubungkan individu dan kelompok untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, sehingga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini memuat teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi sosial.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Wahab dan Sapriya (2011), pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang negara dan hukum, tetapi juga membentuk karakter dan sikap demokratis warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2001) yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konsep pemberdayaan masyarakat merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya, membuat

keputusan, dan menyelesaikan masalah secara mandiri (Ife, 2002). Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat harus melibatkan proses partisipatif yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek dari program-program yang dirancang dari atas.

Partisipasi sosial merupakan elemen kunci dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi sosial mencakup keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara langsung dalam setiap tahapnya.

Dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat, Chambers (1995) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif sebagai dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat yang diberdayakan melalui pendidikan dan memiliki kesadaran kewarganegaraan yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membangun kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap realitas sosial yang dihadapi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hoskins dan Mascherini (2009), pendidikan kewarganegaraan memiliki korelasi positif dengan tingkat partisipasi sipil, terutama di kalangan generasi muda. Pemahaman terhadap demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan dapat membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi sosial memiliki dampak signifikan terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Putnam (2000) dalam bukunya *Bowling Alone* menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi memiliki jejaring sosial



yang kuat, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan dan kerja sama yang lebih baik antarwarga. Jejaring sosial ini penting dalam membangun komunitas yang resilien terhadap berbagai tantangan sosial.

Penggunaan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi sosial di era digital. Menurut Shirky (2011), media sosial memberikan platform baru bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, membentuk komunitas virtual, dan mengorganisasi gerakan sosial secara lebih efisien dan luas. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan melalui pendidikan kewarganegaraan juga perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan dampaknya.

Dengan demikian, sinergi antara pendidikan kewarganegaraan dan strategi peningkatan partisipasi sosial dapat menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, aktif, dan berdaya. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang mampu menjalankan peran sosialnya secara optimal demi kemajuan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menerapkan teknik kajian literatur sistematis untuk menghimpun, menganalisis, serta menyintesis data ilmiah yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya.

Penelitian kualitatif merupakan data yang diperoleh dari keludupan manusia yang tinggal dalam suatu wilayah sehingga perilaku individu tersebut dapat langsung diamati dan berusaha menggambarkan, menuturkan, serta menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa

sekarang. Dalam penelitian ini, membangun fondasi budaya belajar diamati oleh peneliti. Peneliti juga mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam membangun fondasi budaya belajar berbasis etika dan moral, serta upaya membangun fondasi budaya belajar berbasis etika dan moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi sosial. Pemerintah memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat terdorong untuk membantu sesamanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi dalam beberapa aspek utama. Pertama, pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Kedua, pendidikan ini turut mengembangkan keterampilan masyarakat, seperti berpikir kritis, kemampuan analisis, dan komunikasi, yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Ketiga, nilai-nilai positif seperti toleransi, keadilan, dan sikap saling menghormati juga ditanamkan, memperkuat ikatan sosial antarwarga. Keempat, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana dialog dan diskusi terbuka mengenai isu-isu sosial dan politik, memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat. Kelima, akses terhadap informasi yang akurat mengenai kebijakan publik dan hak-hak warga negara turut diberikan untuk memperkuat kapasitas partisipatif masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari berbagai kendala. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka. Di beberapa



daerah terpencil, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah utama. Selain itu, kurikulum yang kurang relevan dan fasilitas pembelajaran yang minim juga menjadi hambatan tersendiri. Upaya sosialisasi yang kurang masif menyebabkan informasi terkait pendidikan kewarganegaraan tidak sampai ke semua lapisan masyarakat. Ketidakberdayaan ekonomi juga membuat masyarakat lebih fokus pada kebutuhan dasar, sehingga mengabaikan aspek pendidikan dan partisipasi sosial. Di samping itu, nilai budaya yang berbeda di setiap daerah juga turut memengaruhi penerimaan terhadap pendidikan kewarganegaraan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan agar partisipasi sosial meningkat. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi salah satu langkah awal, diikuti dengan pelatihan guru agar mampu menyampaikan materi secara menarik dan kontekstual. Berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, kampanye lingkungan, serta keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan telah dimanfaatkan sebagai wahana pembelajaran partisipatif. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas dan menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi komunitas juga terus diperkuat melalui seminar, workshop, dan diskusi publik. Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah marginal, dilakukan melalui program kelas malam dan pembelajaran daring. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik sebagai bentuk pemberdayaan nyata. Evaluasi berkala terhadap program pendidikan kewarganegaraan pun dilakukan agar efektivitasnya terus meningkat.

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran sentral dalam membentuk masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini menjadi sangat relevan terutama bagi generasi milenial yang hidup dalam dinamika

masyarakat modern yang kompleks. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, generasi ini menghadapi berbagai tantangan baru seperti keberagaman budaya, persoalan etika, serta dinamika hukum dan politik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan untuk membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, kesadaran sosial, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Penerapan strategi yang tepat dalam pendidikan kewarganegaraan, seperti penggunaan teknologi pembelajaran interaktif, pelatihan bagi pendidik, serta keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, menjadi langkah efektif dalam membentuk generasi yang sadar dan siap menghadapi tantangan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat meningkatkan motivasi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Integrasi materi kewarganegaraan dengan kehidupan sehari-hari, seperti melalui tugas proyek sosial atau diskusi mengenai isu-isu aktual, terbukti meningkatkan relevansi pendidikan ini di mata peserta didik. Faktor pendukung keberhasilan pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah pesatnya kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran aktif warga negara. Kompleksitas masyarakat modern yang terus berkembang menuntut adanya sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Kurangnya pemahaman terhadap esensi pendidikan ini membuat sebagian masyarakat tidak memprioritaskan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya motivasi dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial menjadi hambatan serius yang harus diatasi dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Selain itu, keterbatasan informasi dan akses, terutama di daerah terpencil, serta metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional juga mengurangi efektivitas program yang ada.



Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Edukasi publik mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan harus ditingkatkan, tidak hanya di ruang kelas tetapi juga melalui media massa dan platform digital. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam merancang kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, strategi yang partisipatif, interaktif, dan berbasis konteks lokal akan lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya saling mendukung dan menolong sesama. Melalui pendidikan ini, masyarakat didorong untuk memahami nilai-nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam memotivasi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan saling membantu, di mana pun mereka berada. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses dan kualitas. Di banyak daerah, khususnya wilayah terpencil, akses terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas masih sangat terbatas. Hal ini menghambat masyarakat dalam memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Selain itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang digunakan sering kali kurang relevan dengan konteks lokal dan tidak

menarik bagi peserta didik. Ketika materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau disampaikan dengan cara yang monoton, minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial cenderung rendah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis. Pertama, meningkatkan akses pendidikan dengan membuka lebih banyak program pendidikan kewarganegaraan di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Kedua, melakukan pengembangan kurikulum yang relevan, menarik, dan kontekstual, agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketiga, menyelenggarakan pelatihan berkala bagi para guru agar mereka mampu menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan berdampak. Melalui langkah-langkah ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi sosial di berbagai lapisan.

SARAN

Agar ke depannya masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya rasa sosial terhadap sesama, pendidikan kewarganegaraan harus terus ditanamkan sebagai bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai sosial dan etika yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sosialnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kehidupan sosial yang berkeadaban dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar pemberdayaan melalui pendidikan kewarganegaraan dapat terus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kegiatan ini akan membantu sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam memantau



perkembangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di suatu wilayah.

Dukungan masyarakat juga sangat diharapkan agar pendidikan kewarganegaraan dapat terus diakses secara merata, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat yang memadai, akses terhadap pendidikan yang berkualitas akan sulit terwujud. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penyebaran pendidikan kewarganegaraan yang efektif dan bermakna.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi sosial. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual sesuai karakteristik daerah atau kelompok masyarakat tertentu, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Tri Ulan dari ,Dkk. Memberdayakan Pendidikan Kewarganegaraan Milenial: Menavigasi Kompleksitas Masyarakat Modern. 2963-3176
- Normina,partisipasi masyarakat dalam pendidikan,vol.14
- Arifin, Z. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 123-135.
- Kurniawan, D. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 45-60.
- Nursanti, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sudrajat, H. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Partisipasi Masyarakat: Analisis Pengaruhnya terhadap*

Keterlibatan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(3), 213-228.

- Santoso, A. (2021). *Membangun Kewarganegaraan yang Aktif Melalui Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Suhardi, E. (2018). Kewarganegaraan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 90-104.
- Wijaya, B. (2020). Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Sosial di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 4(1), 15-30.
- Zainuddin, M. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.